

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEGIATAN SPPNPM-MP_d TERHADAP
EKONOMI KELUARGA
DI KECAMATAN IV KOTOKABUPATEN AGAM
(Studi Kasus Kelompok SPP Aster dan Usaha Keluarga Mandiri)**

Artikel

OLEH

**RAHMI ARTATI, SSTP
1021202102**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2016**

ANALISIS IMPLEMENTASI KEGIATAN SPP PNPM-MPd TERHADAP
EKONOMI KELUARGA DI KECAMATAN IV KOTO KABUPATEN AGAM
(Studi Kasus pada Kelompok SPP Aster dan Kelompok SPP Usaha Keluarga
Mandiri)

ABSTRAK

Oleh : Rahmi Artati

(Dibawah bimbingan : Dr. Ir. Endry Martius, M.Sc dan Prof. Dr. Erwin, M.Si)

Kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) adalah upaya pemerintah Indonesia untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan social dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja. Penelitian mengenai implementasi kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP), dilaksanakan di Nagari Balingka dan Nagari Koto Panjang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan November hingga Desember 2015. Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan implementasi kegiatan SPP pada kelompok spp di Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam dan menganalisis manfaat kegiatan SPP terhadap ekonomi keluarga anggota Kelompok SPP di Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang didukung oleh data kuantitatif. Adapun populasi adalah pemanfaat pada Kelompok SPP Aster Kampuang Pisang yang pengembalian angsuran dapat berjalan lancar dan Kelompok SPP Usaha Keluarga Mandiri Balingka yang pengembalian angsuran terjadi kemacetan. Pengambilan sampel dilakukan secara acak pada Kelompok Aster dan secara sensus pada Kelompok Usaha Keluarga Mandiri yang berjumlah sebanyak 44 responden. Adapun data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Untuk mengetahui tujuan pertama dan kedua dianalisa secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kegiatan spp yang dilaksanakan oleh UPK dan kelompok SPP Aster sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, sedangkan bagi kelompok SPP Usaha Keluarga Mandiri belum sesuai dengan SOP yang disebabkan usaha anggota kelompok mengalami kemacetan. Penerapan pemanfaatan dana SPP oleh anggota ke dua kelompok 100% dipergunakan untuk modal usaha, bagi Kelompok Aster usaha dapat berjalan lancar sedangkan bagi kelompok SPP Usaha Keluarga Mandiri tidak mengalami kelancaran usaha yang disebabkan oleh permasalahan dalam hal pemasaran hasil usaha yang kemudian berimbas kepada macetnya pengembalian angsuran pinjaman. Dana SPP dirasakan manfaatnya dalam peningkatan produksi, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pemasaran, peningkatan pendapatan dan pengembangan usaha, yang mana manfaat ini lebih dirasakan oleh Kelompok SPP Aster. Disarankan, adanya pembinaan dan pelatihan terhadap peningkatan kualitas, kemasan dan sistem pemasaran produksi kepada kelompok SPP oleh instansi teknis terkait serta pembinaan pengelolaan simpan pinjam oleh UPK ditingkatkan dengan bekerjasama dengan pihak yang berkompeten untuk mewujudkan pelestarian dan pengembangan lembaga simpan pinjam di pedesaan.

**ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF SPP PNPM-MPD ECONOMY ON
THE FAMILY IN THE DISTRICT DISTRICT AGAM IV KOTO
(Case Study on Aster SPP Group SPP Group and Family Business Independent)**

ABSTRACT

By: Rahmi Artati

(Under the guidance of Dr. Ir. Endry Martius, M.Sc and Prof. Dr. Erwin, M.Si)

Savings activities specifically Female (SPP) is the Indonesian government's efforts to develop the potential of micro-credit activities rural, ease of access to finance micro enterprises, fulfillment of funding social base, and strengthen the institutional activities of women and to encourage the reduction of poor households and job creation. Research on the implementation of the activities of the women's credit (SPP) National Program for Rural Community Empowerment (PNPM-MP), held in Nagari Balingka and the District IV Nagari Koto Koto Panjang Agam This study was conducted in November hingga Desember 2015. The purpose of this study is to describe implementa sikegiatan spp SPP group in District IV Koto Agam and analyze the benefits of economic activities of the family anggot SPP SPP group in District IV Koto Kabupaten Agam.

The method used in this research is qualitative research supported by quantitative data. The population is utilizing the SPP Group Aster Kampuang installment repayment Bananas can run smoothly and SPP Group Family Business Independent Balingka the repayment installments jam. Sampling is done randomly at Aster Group and sensuspada Independent Family Business Group, amounting to as much as 44 respondents. The data collected in this study are primary data and secondary data. To know the purpose of the first and second analyzed descriptively qualitative.

The results showed that the implementation of the activities carried out by the spp UPK and SPP Aster are in accordance with the SOP that has been established, while the SPP group Usaha Mandiri Families not in accordance with SOP resulting group member's business stalled. Application of utilization of funds SPP members into two groups of 100% is used for working capital, the Group Aster business can run smoothly while for SPP Family Business Independent did not experience the business they are caused by problems in terms of marketing the results of operations which then affected the breakdown of repayment installments loan. Dana SPP perceived benefits in increased production, employment, increased marketing, increased revenue and developing a business, which is more dirasakanoleh benefits SPP Aster Group. Suggested, their coaching and training to improve the quality, packaging and marketing systems of production to the SPP by the relevant technical agencies and development management of savings by UPK enhanced cooperation with the competent authorities to realize the preservation and development of rural savings and loan institutions

A. Latar Belakang

Pembangunan yang berbasis pedesaan diberlakukan untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan perkembangan antar wilayah, sebagai solusi bagi perubahan sosial, desa sebagai basis perubahan. Dalam realisasinya, pembangunan pedesaan memungkinkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi digerakkan kepedesaan sehingga desa menjadi tempat yang menarik sebagai tempat tinggal dan mencari penghidupan. Infrastruktur desa seperti irigasi, sarana dan prasarana transportasi, listrik, telpon, sarana pendidikan, kesehatan dan sarana-sarana lain yang dibutuhkan, harus bisa disediakan sehingga memungkinkan desa maju dan berkembang.

Usaha mikro dan kecil merupakan usaha yang paling banyak digeluti di Indonesia. Usahaini terbukti mampu menopang perekonomian rumah tangga miskin dan bisa menjadi penyangga ekonomi nasional. Perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi memiliki

potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Produk Domestik Bruto(PDB) Indonesia Tahun 2007 tumbuh sebesar 6,3% terhadap Tahun 2006. Bila dirinci menurut skala usaha, pertumbuhan PDB Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mencapai 6,4% dan Usaha Besar (UB) tumbuh 6,2%. Dibandingkan Tahun 2006 pertumbuhan PDB UKM hanya 5,7%, dan PDB UB hanya 5,2%. Pada Tahun 2007 total nilai PDB Indonesia mencapai Rp3.957,4 triliun, dimana UKM memberikan kontribusi 2.121,3 triliun rupiah atau 53,6% dari total PDB Indonesia. Pertumbuhan PDB UKM Tahun 2007 terjadi disemua sektor ekonomi. Jumlah populasi UKM pada tahun 2007 mencapai 49,8 juta unit usaha, atau 99,99% terhadap total unit usaha di Indonesia, sementara jumlah tenaga kerjanya mencapai 91,8 juta orang atau 97,3% terhadap seluruh tenaga kerja Indonesia (BPS dan Kemenekop UKM, 2008).

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinir. Namun

penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan (P3KBPM-PNPM Mandiri, 2010).

Dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan, pembangunan pedesaan tidak terlepas dari pembangunan sumber daya manusianya serta pemberdayaan masyarakat pedesaan. Sebagaimana skala prioritas pembangunan pedesaan yang berbasis pada pengembangan pedesaan (rural based development), meliputi (Helmy, 2014) :

- a) Pengembangan ekonomi lokal,
- b) Pemberdayaan masyarakat,
- c) Pembangunan prasarana dan sarana,
- d) Pengembangan kelembagaan.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat selama ini telah banyak diupayakan melalui berbagai

pembangunan sektoral maupun regional. Namun karena dilakukan secara parsial dan tidak berkelanjutan, efektivitasnya terutama untuk penanggulangan kemiskinan dipandang masih belum optimal. Untuk itu melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) diharapkan dapat terjadi harmonisasi prinsip-prinsip dasar, pendekatan, strategi, serta berbagai mekanisme dan prosedur pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga proses peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien (Tim Pengendali PNPM Mandiri, 2008).

PNPM-MPd merupakan jenis program dari pemerintah pusat untuk memberdayakan masyarakat di pedesaan yang bersifat devolusi berupa dana yang dikelola oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) maupun kelompok untuk jenis kegiatan infrastruktur, ekonomi dan pendidikan. Kegiatan ekonomi berupa pemberian kredit kepada kelompok-kelompok masyarakat dengan beranggotakan perempuan yang disebut dengan SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan).

Keunggulan pinjaman kelompok melalui dana SPP ini adalah sebagai berikut : a) Adanya kemudahan dalam pengajuan dan tanpa syarat agunan.b) dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman, c) Bunga relatif kecil dan dibawah standar lokal yaitu 10% d) Keberdayaan, artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang profesional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan, e) Pengembangan, artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan, sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat perdesaan, e) kuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk (1) Mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan; (2)Akses pendanaan

usaha skala mikro; (3)Pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar; (4) Memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan; (5) Mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk 1) Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar; 2) Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha; 3) Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

Bertitik tolak dari hal-hal yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini akan menganalisis : **“Analisis Implementasi Kegiatan SPP PNPM-MPd Terhadap Ekonomi Keluarga di Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam (Studi Kasus Kelompok SPP Aster dan Usaha Keluarga Mandiri)”**.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mendiskripsikan implementasikegiatan SPP pada

Kelompok SPP di Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.

- b. Menganalisis manfaat kegiatan SPP terhadap ekonomi keluarga anggota Kelompok SPP di Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam. Dipilihnya Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam karena Kecamatan IV Koto termasuk Kecamatan yang dinilai baik dalam melaksanakan program PNPM-MPd.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah rumah tangga yang tergabung dalam Kelompok SPP yang pengelolaannya berjalan dengan baik serta pengembalian angsuran tidak mengalami kemacetan dan rumah tangga yang tergabung dalam Kelompok SPP yang mengalami kemacetan dalam pengembalian angsuran pinjaman, yaitu kelompok SPP Aster Kampuang Pisang Nagari Koto Panjang (lancar) dan Kelompok SPP Usaha Keluarga Mandiri

Pahambatan Nagari Balingka (macet) di Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam. Jumlah populasi dari penelitian ini adalah sebanyak 68 rumah tangga dengan rincian sebagai berikut :

Pengambilan sampel pada populasi Kelompok SPP Aster dilakukan dengan simple random sampling yaitu teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Dengan demikian setiap unit sampling sebagai unsur populasi yang terpicil memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakili populasi (Sugiyono, 2004). Jumlah sampel ditetapkan sekitar 50% dari total Rumah Tangga pada masing-masing kelompok. Menurut Surachmad (1982) penentuan jumlah sampel jika populasi kurang dari 100 diambil sampel sebanyak 50%, apabila populasi antara 100-1.000 diambil sampel sebanyak 15-50% dan apabila lebih dari 1.000 maka diambil sampel sebanyak 10-15%.

E. Analisa Data

a. Untuk mengetahui implementasi mekanisme program SPP di Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, dilakukan dengan deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran secara umum tentang tahapan pelaksanaan kegiatan Kelompok SPP yang ada di Kecamatan IV Koto, seperti tahap pengusulan, pencairan, pengembalian dan pembinaan.

b. Untuk mengetahui manfaat program SPP terhadap ekonomi keluarga, dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran terhadap manfaat SPP oleh anggota kelompok berdasarkan hasil kuisioner yang disebarkan kepada responden, seperti kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, memperkuat kelembagaan simpan pinjam, pendanaan modal usaha, penambahan pendapatan keluarga dan penciptaan lapangan kerja.

F. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Pelaku PNPM-MPd

Adapun pelaku-pelaku PNPM-MPd di Kecamatan IV Koto khususnya untuk kegiatan SPP adalah sebagai berikut :

a. Walinagari

Peran Walinagari adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM-MPd di nagari. Walinagari juga berperan mewakili nagarinya dalam pembentukan Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN)

b. Pendamping Lokal (PL)

PL adalah tenaga pendamping dari masyarakat yang membantu Fasilitator Kegiatan untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan tahapan dan kegiatan PNPM-MPd mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Di setiap kecamatan ditempatkan satu orang PL. PL dipilih dari Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN) terbaik yang pemilihannya dilakukan pada saat pelatihan KPMN.

c. Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

UPK adalah unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM-MPd di kecamatan dan membantu BKAN mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Pengurus UPK terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat bukan pegawai negeri sipil, staf kecamatan atau perangkat nagari yang diajukan dan dipilih berdasarkan hasil musyawarah nagari.

d. Tim Verifikasi

Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus di bidang simpan pinjam yang dibentuk setiap tahun. Tim verifikasi berperan melakukan pemeriksaan serta penilaian terhadap usulan simpan pinjam yaitu tentang kelayakan kelompok, usaha anggota dan kelayakan besaran pinjaman.

d. Tim Pendanaan

Tim Pendanaan adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah di tingkat kecamatan. Tim Pendanaan berperan

dalam menentukan kelompok yang akan didanai serta besaran alokasi pinjaman kepada kelompok beserta unsur lainnya dalam musyawarah pendanaan. Tim Pendanaan Kecamatan IV Koto diangkat berdasarkan Surat Keputusan Camat IV Koto yang berjumlah sebanyak 3 orang. Kepada masing-masing Tim Pendanaan diberikan insentif sebesar Rp.50.000,- untuk setiap kegiatan musyawarah pendanaan yang berasal dari surplus/laba kegiatan SPP.

e. Fasilitator Kegiatan

Fasilitator Kegiatan merupakan pendamping masyarakat yang berperan memfasilitasi masyarakat dalam setiap proses tahapan, mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian serta membimbing Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari atau pelaku-pelaku lainnya di nagari dan kecamatan.

f. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK)

PJOK adalah Kepala Seksi Pemberdayaan atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di kecamatan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati

dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan operasional kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan PNPM-MPd di kecamatan.

g. Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN)

BKAN adalah sebuah lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar nagari di satu wilayah dalam satu kecamatan dengan tujuan untuk melindungi dan melestarikan hasil-hasil program yang terdiri dari kelembagaan UPK, sarana prasarana, hasil kegiatan bidang pendidikan, kesehatan dan perguliran dana.

h. Camat

Camat berperan sebagai pembina pelaksanaan PNPM-MPd pada nagari di kecamatan. Selain itu Camat juga bertugas untuk mengesahkan usulan-usulan kegiatan yang telah disepakati dalam Musyawarah Antar Nagari (MAN) untuk didanai melalui PNPM-MPd dalam bentuk Surat Penetapan Camat.

2) Gambaran Umum Kelompok Simpan Pinjam Perempuan

Kelompok SPP di Kecamatan IV Koto berjumlah 46 kelompok, dengan rincian 37 kelompok (80,43%) lancar mengembalikan

angsuran pinjaman dan 9 kelompok (19,57%) mengalami kemacetan.

Berikut gambaran dua buah kelompok SPP mengenai latar belakang dan kondisi kelompok yaitu Kelompok SPP Aster yang terletak di Jorong Kampuang Pisang Nagari Koto Panjang dan Kelompok SPP Usaha Keluarga Mandiri yang berada di Jorong Pahambatan Nagari Balingka. Kelompok SPP Aster merupakan salah satu kelompok yang lancar mengembalikan angsuran pinjaman bahkan mendapat penghargaan dari UPK berupa IPTW (Insentif Pembayaran Tepat Waktu), sedangkan Kelompok SPP Usaha Keluarga Mandiri adalah salah satu kelompok yang mengalami kemacetan dalam pengembalian angsuran pinjaman,

3). Implementasi Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan

Sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu, kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) merupakan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Untuk mendapatkan pinjaman pada program ini diterapkan prosedur dan

mekanisme seperti yang tercantum dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun. Ada 7 langkah prosedur yang dilalui oleh calon penerima yang meliputi :

- (1) Pengajuan Permohonan Pinjaman/Proposal oleh Kelompok.
- (2) Verifikasi Usulan oleh UPK.
- (3) Verifikasi Teknis oleh Tim Verifikasi.
- (4) Musyawarah Pendanaan.
- (5) Penandatanganan Berita Acara dan Surat Penetapan Camat (SPC).
- (6) Informasi Hasil Musyawarah Pendanaan
- (7) Penyaluran Pinjaman.

a). Pengajuan Permohonan Pinjaman/Proposal

Untuk mendapatkan pinjaman melalui dana SPP, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengajukan permohonan pinjaman/proposal kepada UPK. Pada tahap ini pihak UPK sudah mulai melakukan fasilitasi proses peminjaman. Bagi calon peminjam yang kesulitan dalam pembuatan proposal, maka UPK memberikan bantuan cara pembuatan proposal dan pengisian formulir yang telah disiapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Kelompok SPP Aster dan Ketua Kelompok SPP Usaha Keluarga Mandiri, diketahui bahwa mereka merasa sangat terbantu dengan fasilitasi yang diberikan oleh pihak UPK. Disini terlihat adanya kemudahan dalam proses pengajuan permohonan pinjaman. Kelompok memilih mengajukan permohonan pinjaman melalui dana SPP karena adanya kemudahan dalam pengajuan permohonan, tidak adanya agunan dan tingkat suku bunga sangat rendah yaitu 10% dalam setahun. Berdasarkan pengalaman ketua kelompok dalam pengajuan permohonan pinjaman disampaikan bahwa pihak UPK membantu ketua kelompok dalam pembuatan proposal berupa menyediakan blangko isian dan formulir, memberikan arahan dan penjelasan pengisian serta lampiran-lampirannya.

Tidak jauh berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh anggota kelompok, berdasarkan pengalaman mereka merasakan adanya kemudahan dalam pengajuan pinjaman yaitu cukup dengan mengisi formulir yang kemudian dikumpulkan kepada Ketua

Kelompok untuk diajukan dalam proposal tanpa disyaratkan agunan.

b) Verifikasi Usulan oleh UPK

Langkah selanjutnya adalah verifikasi usulan/proposal terhadap pemohon yang mengajukan permohonan dana SPP oleh UPK. Proposal yang diantarkan oleh pemohon ke UPK langsung diverifikasi oleh UPK dihadapan si pemohon atas kelengkapan persyaratan proposal yang diajukan tersebut, agar apabila ada kekurangan bisa langsung diketahui dan dilengkapi oleh pemohon.

Dari hasil wawancara dengan ketua UPK diketahui bahwa walaupun dalam pembuatan proposal sudah dibantu, namun ketika pengajuan ke UPK masih ada dijumpai persyaratan proposal yang masih belum lengkap, sehingga perlu diverifikasi langsung dihadapan pemohon agar dapat dilengkapi secepatnya.

Berdasarkan wawancara dengan kedua Ketua Kelompok SPP, diketahui bahwa proposal yang mereka ajukan ke kantor UPK langsung diverifikasi oleh pihak UPK yang sedang berada di Kantor.

Dari pengalaman yang mereka alami terhadap beberapa kali mengajukan proposal, diketahui bahwa setiap mengantarkan proposal ke kantor UPK selalu ditemui UPK sedang berada di kantor, baik lengkap maupun salah seorang diantara mereka. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan dapat segera mereka ketahui dan segera melengkapinya. UPK tidak memberikan batas waktu perbaikan kepada kelompok, hanya saja kalau terlalu lama tentu akan mempengaruhi terhadap jadwal pencairan pinjaman kelompok itu sendiri.

c). Verifikasi Teknis oleh Tim Verifikasi

Langkah ke tiga adalah verifikasi teknis oleh Tim Verifikasi. Proposal yang telah memenuhi persyaratan diserahkan oleh UPK kepada Tim Verifikasi untuk dilakukan verifikasi lapangan seperti kelayakan organisasi kelompok yaitu apakah kelompok sudah memenuhi aturan atau persyaratan untuk mendapatkan dana SPP, kegiatan kelompok, usaha anggota yang meminjam, aturan yang disepakati kelompok, pengelolaan keuangan dan pinjaman, jumlah rumah tangga

miskin adalah 2/3 dari jumlah anggota yg mengajukan pinjaman, serta kelayakan pinjaman yang akan disalurkan. Dengan kepemihakan kepada masyarakat miskin inisesuai dengan aspek pemberdayaan menurut Suriadi (2005) yaitu adanya dukungan terhadap keterlibatan kaum miskin.

Tim Verifikasi bertanggung jawab melakukan verifikasi terhadap pemohon, diharapkan dengan verifikasi teknis yang ketat tidak ada kelompok yang tidak layak lolos untuk mendapatkan pinjaman, sebab hal ini sangat berdampak kepada pengembalian pinjaman dan terhadap kelangsungan kegiatanSPP itu sendiri.

d). Musyawarah Pendanaan

Proses selanjutnya adalah musyawarah pendanaan. Daftar rekomendasi kelompok berdasarkan prioritas yang dihasilkan oleh Tim Verifikasidibahas oleh Tim Pendanaan dan unsur terkait lainnya untuk menyepakati kelompok yang akan didanai serta besaran nilai pinjaman.

Peserta musyawarah pendanaan berjumlah 12 orang yang terdiri dari:

- a. Pengurus Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN) sebanyak 3 orang
- b. UPK sebanyak 3 orang
- c. Tim Verifikasi sebanyak 3 orang
- d. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) sebanyak 1 orang
- e. Fasilitator Kegiatan (FK) sebanyak 1 orang
- f. Tim Pendanaan sebanyak 3 orang

Disamping dihadiri oleh unsur sebagaimana di atas, musyawarah pendanaan juga dihadiri oleh Walinagari lokasi kelompok yang akan didanai.

Berdasarkan pengalaman UPK, dalam pelaksanaan musyawarah pendanaan yang telah dilaksanakan, tingkat kehadiran peserta berkisar antara 80%-100%. Hasil musyawarah, biasanya dana yang disepakati untuk disalurkan kepada kelompok jumlahnya berkurang dari yang diusulkan oleh kelompok.

e) Penandatanganan Berita Acara dan Surat Penetapan Camat (SPC)

Langkah selanjutnya adalah penandatanganan berita acara dan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan surat penetapan oleh camat. Hasil musyawarah pendanaan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pendanaan. Kemudian dilanjutkan dengan penetapan camat yang dituangkan dalam Surat Penetapan Camat (SPC). Pada SCP ini tercantum daftar nama-nama kelompok yang akan didanai, jumlah anggota serta besaran jumlah pinjaman yang akan disalurkan kepada kelompok.

f). Informasi Hasil Musyawarah Pendanaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua UPK, diketahui bahwa setelah SPC ditandatangani oleh Camat, maka UPK wajib memberikan informasi kepada masyarakat umum menyangkut kelompok SPP yang akan didanai melalui dana SPP. Informasi ini disampaikan dengan menempelkan SPC pada papan pengumuman, baik papan pengumuman milik PNPM di

kantor UPK maupun pada papan pengumuman yang ada di Kantor Camat. Disamping informasi pada papan pengumuman tersebut, UPK juga menyampaikan informasi ini kepada Ketua Kelompok yang akan didanai melalui telepon agar ketua kelompok dapat secara langsung dan cepat mendapatkan informasi sehingga bisa menyampaikan kepada anggota kelompok.

4). Implementasi Penyaluran SPP

Dalam mendiskripsikan implementasi terhadap mekanisme penyaluran dana SPP, maka dapat dilihat melalui implementasi penyaluran SPP dari UPK kepada kelompok dan implementasi penyaluran SPP dari pengurus Kelompok SPP kepada anggota kelompok.

a) Dari UPK kepada Pengurus

Berdasarkan hasil wawancara dengan UPK, diketahui bahwa dalam kegiatan penyaluran dana SPP kepada kelompok, disamping dihadiri oleh UPK juga dihadiri oleh Camat, Walinagari, Walijorong, BKAN dan Pendamping Lapangan. Tujuan dihadiri oleh unsur tersebut, selain memberikan arahan dan

nasehat kepada kelompok juga sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kelancaran program ini. Diharapkan anggota kelompok termotivasi dalam memanfaatkan dana sesuai kebutuhan serta mempunyai beban moral dan tanggungjawab untuk mengembalikan angsuran sesuai dengan aturan.

Berdasarkan pengalaman dari anggota Kelompok SPP Aster diketahui bahwa anggota kelompok merasa senang dengan proses penyaluran dana yang didampingi langsung oleh UPK ini karena menunjukkan transparansi dan dana yang mereka terima sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini tentu akan mempengaruhi terhadap meningkatnya kepercayaan anggota kepada pengurus.

b). Dari Pengurus kepada Anggota

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa anggota kelompok SPP merasa puas dengan proses pencairan pinjaman kepada peminjam. Hasil penelitian ini mendapatkan bahwa pada kelompok SPP Aster 52% responden menjawab sangat puas terhadap proses

pinjaman dan 48% menjawab puas. Sedangkan kelompok SPP Usaha Mandiri sebanyak 79% menjawab puas dan 21% menjawab sangat puas. Responden menjawab sangat puas karena prosedurnya jelas, mudah, tidak rumit dan tidak sulit, tidak berbelit-belit, cepat, tepat waktu serta transparan. Responden menjawab puas karena prosedurnya mudah, tidak berbelit-belit dan cepat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua kelompok SPP Aster, diketahui bahwa prosedur penyaluran dana SPP kepada anggota sangatlah mudah dan transparan. Setelah dana disalurkan oleh UPK kepada Ketua kelompok dihadapan anggota dengan jumlah sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan, maka pengurus mencatat pada buku kas kelompok. Dengan didampingi oleh UPK, ketua kelompok menyalurkan dana tersebut kepada anggota kelompok sesuai dengan besaran pinjaman yang telah ditetapkan oleh tim pendanaan yang dibuktikan dengan kuitansi tanda terima. Kuitansi tanda terima ini dipegang oleh pengurus dan anggota kelompok yang meminjam.

Dalam penyaluran dana SPP dari pengurus kepada anggota, untuk kelompok SPP Aster telah didampingi oleh UPK sejak 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Sedangkan kelompok SPP Usaha Keluarga Mandiri yang mendapat alokasi dana SPP pada tahun 2012 belum didampingi oleh UPK pada saat penyaluran kepada anggota. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa adanya pendampingan oleh UPK saat penyaluran dana dari pengurus kepada anggota kelompok maka akan mempengaruhi terhadap kelancaran pengembalian angsuran, hal ini disebabkan karena adanya kepercayaan anggota kepada pengurus dengan transparansi yang diterapkan.

5). Implementasi Besaran Pinjaman kepada Anggota Kelompok

Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MPd dijelaskan bahwa : (1) Besarnya pinjaman kelompok baru, untuk tahap pertama peminjaman maksimalnya adalah Rp. 3.000.000,-/orang (tiga juta rupiah per orang). (2) Pengajuan tahap dua, kelompok berhak mendapat pinjaman kembali maksimal sebesar

Rp. 5.000.000,-/orang (lima juta rupiah per orang). (3) Pengajuan tahap ke tiga dan seterusnya kelompok berhak mendapat pinjaman kembali maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah per orang).

Hasil penelitian ini mendapatkan bahwa ada anggota kelompok mendapatkan besaran pinjaman tidak sesuai dengan besaran maksimal yang dapat dipinjamkan kepada anggota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Kelompok masing-masing, diketahui bahwa besaran pinjaman yang diberikan kepada anggota berbeda-beda dan tidak sebanyak jumlah maksimal yang bisa mereka terima. Hal ini disebabkan karena besaran pinjaman yang disalurkan kepada peminjam sesuai dengan usulan anggota berdasarkan kebutuhan dan kemampuan mengembalikan angsuran, dalam artian walaupun peminjam berkesempatan untuk mengusulkan pinjaman sesuai dengan usulan maksimal namun ada juga peminjam yang mengusulkan sesuai dengan kebutuhan dibawah usulan maksimal. Disamping itu juga

berdasarkan pertimbangan kondisi usaha dan ekonomi anggota kelompok tersebut oleh tim verifikasi, sehingga penyaluran dana kepada anggota kelompok mengalami variasi.

Berdasarkan keterangan tim verifikasi diketahui bahwa ketika dilakukan verifikasi terhadap usaha anggota kelompok maka ada dijumpai kondisi usaha belum layak untuk diberikan pinjaman sesuai permohonan yang bersangkutan, sehingga tidak seluruh besaran pinjaman yang diajukan oleh masing-masing anggota kelompok dapat direkomendasikan kepada tim pendanaan.

6). Implementasi Besaran Tingkat Bunga

Besaran tingkat bunga yang dibayarkan oleh kelompok kepada UPK adalah sebesar 10% dalam setahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam PTO. Namun dalam pelaksanaannya pengurus memberikan beban bunga kepada anggota kelompok sebesar 12% dalam setahun atau 1% setiap bulannya.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Kelompok SPP

Aster dan Ketua Kelompok Usaha Keluarga Mandiri, diketahui bahwa pengurus kelompok memungut bunga kepada anggota kelompok sebanyak 12% dengan perincian 10% dibayarkan kepada UPK dan 2% untuk kelompok. Pemungutan bunga tambahan 2% ini sudah berdasarkan kesepakatan anggota kelompok dan sudah berlangsung sebelum kelompok meminjam dana SPP. Bunga 2% untuk kelompok dipergunakan untuk penambahan modal simpan pinjaman kelompok, insentif pengurus, kesejahteraan anggota dalam bentuk THR dan untuk operasional kelompok berupa konsumsi pertemuan, uang transportasi pengembalian angsuran ke UPK dan pengadaan ATK.

7). Implementasi Proses Angsuran

a. Dari Anggota kepada Pengurus

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua kelompok SPP Aster dan Usaha Keluarga Mandiri, diketahui bahwa anggota mengembalikan angsuran pinjaman setiap 1 kali dalam sebulan selama 12 bulan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. Setiap peminjam memiliki buku simpan pinjam,

kemudian setiap angsuran dicatat oleh bendahara pada buku simpan pinjam yang dipegang oleh anggota tersebut dan juga mencatat pada buku simpan pinjam yang dikelola oleh bendahara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Kelompok SPP Aster, diketahui bahwa pengembalian angsuran oleh anggota selama ini dapat berjalan dengan lancar. Kemacetan hanya dalam bentuk sebagian kecil anggota ada yang terlambat beberapa hari mengembalikan angsuran dari jadwal yang telah ditetapkan. Untuk mengatasi hal ini, maka diterapkanlah tanggung renteng yaitu pengurus memanfaatkan terlebih dahulu dana yang ada di dalam kas kelompok untuk menutupi keterlambatan tersebut sehingga pengembalian angsuran dari pengurus kelompok kepada UPK dapat berjalan dengan lancar. Walaupun sebagian kecil anggota ada yang menunggak pembayaran selama beberapa hari namun tunggakan tersebut dapat dilunasi dengan segera, sehingga dirasakan tidak diperlukan

pembinaan khusus bagi anggota yang menunggak tersebut.

Dari hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa cara mengatasi tunggakan anggota dengan tanggung renteng ternyata efektif diterapkan pada Kelompok SPP Aster, hal ini sangat mempengaruhi terhadap lancarnya pengembalian angsuran. Efektifnya tanggung renteng ini tidak terlepas dari adanya kepercayaan anggota kelompok terhadap yang menunggak bahwa yang bersangkutan akan melunasi kewajibannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kepercayaan ini dapat terwujud disebabkan diantaranya adalah oleh faktor lingkungan yaitu intensitas pertemuan antar anggota yang dapat berlangsung setiap hari yang disebabkan tempat tinggal anggota yang saling berdekatan. Disamping itu juga disebabkan kegiatan pertemuan anggota yang rutin dilaksanakan setiap bulan sehingga dapat mengevaluasi setiap permasalahan yang terjadi. Hal-hal seperti ini mesti harus terus dipertahankan untuk menjamin kelancaran pengembalian angsuran.

b). Dari Pengurus kepada UPK

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua UPK, diketahui bahwa implementasi pengembalian angsuran oleh pengurus kelompok kepada UPK yaitu pengurus kelompok (Ketua dan atau Bendahara) datang langsung ke kantor UPK menemui bendahara UPK untuk pembayaran pengembalian angsuran. Untuk kondisi tertentu dimana bendahara tidak berada di tempat, maka penerimaan angsuran ini dapat diterima oleh Ketua UPK dengan tujuan agar peminjam tidak bolak balik ke kantor UPK. Hal ini juga dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada peminjam. Jika tanggal batas jatuh tempo pengembalian bertepatan dengan hari libur atau tanggal merah, maka untuk pengembalian angsuran ini pihak UPK lah yang langsung mendatangi kelompok ke lokasi.

Jumlah angsuran dicatat pada buku simpan pinjam kelompok dan juga pada buku simpan pinjam yang dikelola oleh bendahara UPK. Sejauh ini sebagian besar pengurus kelompok dapat tepat waktu dalam pengembalian angsuran walaupun

masih ditemui beberapa kelompok yang macet dan menunggak dalam pengembalian angsuran.

8). Manfaat Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan

a). Penggunaan Pinjaman

Berdasarkan hasil kuisioner, didapatkan bahwa 100% responden pada kedua Kelompok SPP memanfaatkan dana SPP untuk kebutuhan modal usaha. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dana spp pada kedua kelompok tersebut sudah sesuai dengan tujuan kegiatan SPP yaitu untuk pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha.

b). Manfaat Pinjaman

a. Bagi Anggota Kelompok

Manfaat dana SPP yang digunakan oleh responden untuk modal usaha dapat dilihat dari aspek peningkatan produksi, terbukanya lapangan kerja, peningkatan pemasaran, peningkatan pendapatan keluarga dan perkembangan usaha.

b. Bagi Kelompok Simpan Pinjam

Salah satu tujuan secara umum kegiatan SPP ini yaitu untuk mengembangkan potensi simpan pinjam perdesaan dan memperkuat

kelembagaan kegiatan kaum perempuan.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Kelompok Aster, diketahui bahwa dengan lancarnya anggota kelompok mengembalikan angsuran pinjaman beserta bunganya, maka sangat berpengaruh terhadap pengembangan kelompok simpan pinjam itu sendiri. Bunga 2% yang dibayarkan oleh anggota kelompok, dapat dipergunakan untuk penambahan modal yang juga dipergunakan untuk pinjaman perguliran kepada anggota kelompok yang lain yang tidak mendapat pinjaman dari SPP.

9). Pembinaan

Dalam rangka untuk mewujudkan lancarnya dan berkembangnya kegiatan SPP, diperlukan pembinaan oleh pihak-pihak terkait kepada kelompok SPP maupun kepada individu anggota kelompok itu sendiri. Pembinaan yang dilaksanakan dalam bentuk pembinaan organisasi atau kelembagaan kelompok spp dan pembinaan khusus kepada kelompok spp yang macet.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu; Yogyakarta
- Agier, Isabelle, Szafarz, Ariane. 2013. *Microfinance and Gender : Is There a Glass Ceiling on Loan Size?* Word Development.
- Agusta, I. 2002. *Metode Evaluasi Program Pemberdayaan*. Humaniora Utama Press; Bandung
- Anoraga, Pandji. 2002. *Koperasi, Kewirausahaan Dan Usaha Kecil*. Rineka Cipta; Jakarta.
- Boche, Dirk Michael, Cruz, Luciano Barin. 2013. *Gender and Microfinance Performance : Why Does The Institutional Context Matter?* World Development.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2008. *Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. <http://www.bappenas.go.id>. (2 Januari 2016).
- Badan Pusat Statistik dan Kementerian Negara Koperasi dan UKM. 2008. *Berita Resmi Statistik UKM BPS* 2008. <http://www.scribd.com>. (2 Januari 2016).
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Kecamatan IV Koto Dalam Angka 2014*; Padang

- Baihaqi, Wazin. 2013. *Pengembangan Potensi Perempuan Dalam Wilayah Ekonomi Domestik – Publik*. Jurnal ; Banten
- Chambers, Robert. 1998. *Pengembangan Desa Mulai Dari Belakang*. LP3ES ; Jakarta
- Daldjoeni dan A. Suyitno. 2004. *Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan*. Artikel
- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 2008. *Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan (PNPM) Mandiri Perdesaan* ; Jakarta
- Dumadia. 2010. *Masalah dan Potensi Pelaksanaan PNPM Mandiri di Kecamatan Butuh, Purworejo*. Blog ; Purworejo
- Faisal S, 1995. *Format-format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasi*. Cetakan Ketiga, PT. Raja Grafindo Persada
- Firdausy CM. 1997. *Pengembangan Potensi Ekonomi Dari Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Biak*. Analisis CSIS ; Jakarta
- Hamdi, Hartrisari Hardjomidjojo dan Amiruddin Saleh. 2013. *Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan di Kecamatan Semparuk, Sambas*. Jurnal ; Bogor
- Harmet, Hari. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Humaniora Utama Pers*; Bandung
- Helmi, Faisal, Zaini, A. 2014. *Pembangunan Pedesaan*. Artikel
- Hubies, Aida Vitayala, S. 2010. *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*. IPB Press; Bogor
- Kartasasmita Ginanjar. 1995. *Pemberdayaan Masyarakat Suatu Tinjauan Administrasi*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brwajiya ; Bandung
- Kartasasmita Ginanjar. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. PT. Pustaka Cidesindo ; Jakarta
- Korten, D.C. dan Sjahrir. 1993. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Yayasan Obor Indonesia dan Pustaka Sinar Harapan; Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*, Cetakan pertama, Unit penerbitan dan percetakan akademi manajemen perusahaan YKPN, Yogyakarta
- Lincoln Arsyad. 2008. *Lembaga Keuangan Mikro Institusi, Kinerja dan Sustainabilitas*; Jakarta
- Mayoux, L. 1999. "Questioning virtuous spirals: Microfinance and women's empowerment in Africa". Dalam Journal of International Development, December
- Mairizal, Lilis. 2015. *Evaluasi Pelaksanaan Dana Bergulir*

- Simpan Pinjam Perempuan Program PNPM-MP di Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman.*
- Moena LN. 1987, *Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan, Beberapa Pengamatan Empiris Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia.* Pustaka ; Jakarta
- Mubyarto, dkk. 1990. *Kredit Pedesaan di Indonesia.* BPFE ; Yogyakarta
- Mubyarto. 1999. *Reformasi Sistem Ekonomi.* Aditya Media ; Jakarta
- Moleong, Lexi J. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- P3KBPM-PNPM MP (Pokja Pengendali Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat-PNPM Mandiri). 2010. *Tentang PNPM*
- Pranaka dan Prijono. 1996. *Pemberdayaan, Konsep Kebijakan dan Implementasi CSIS;* Jakarta
- Prawirokusumo. 2001. *Ekonomi Rakyat: Konsep, Kebijakan, dan Strategi.* BPFE; Yogyakarta
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofyan. 1987. *Metodologi Penelitian Survey.* LP3ES; Jakarta
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.* Alfabeta; Bandung
- Suharto, E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat,* PT. Refika Aditama; Bandung
- Suman, Agus dan Yustika A. Erani. 2007. *Perspektif Baru Pembangunan di Indonesia,* PT. Danar Wijaya, Brawijaya University Press; Malang
- Sumodiningrat. 1997. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat.* PT, Bina Rena Pariwara; Jakarta
- Surakhmad, Winarno, 1982. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar.* Teknik Tarsito; Bandung
- Suriadi, Agus. 2005. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*
- Gulo, W. 2002. *Metode Penelitian.* PT. Grasindo; Jakarta
- Gunawan Sumodiningrat. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial.* PT Gramedia Pustaka Utama; Jakarta
- Tambunan, T. 1998. *Krisis Ekonomi dan Masa Depan Reformasi.* FE-UI; Jakarta.
- Tarmizi, 2007. *Analisa Pelaksanaan dan Peran Business Development Centre (BDC) Pada Program Penyaluran Dana Kemitraan dan Kaitannya dengan Penyerapan Tenaga Kerja oleh UKM Kota Sawahlunto.*
- Tim Pengendali PNPM Mandiri. 2008. *Pedoman Umum Program Nasional PNPM Mandiri.*
- Todaro, Michael P. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (Edisi*

- Kedelapan*). Erlangga; Jakarta
- Usman, H dan Akbar, Setiady, Purnomo. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara; Bandung
- Usman, S. 2004. *Keuangan Mikro Untuk Masyarakat Miskin*. Lembaga Penelitian SMERU. Jakarta
- Qoriah, S.N. dan T. Sumarti. 2008. *Analisis Gender dalam Program Desa Mandiri Pangan (Studi Kasus: Desa Jambakan, Kecamatan Bayat, Klaten-Jawa Tengah)*. Sodality. Kalten
- Zulminarni, Nani. 2008. *Lembaga Keuangan Mikro dalam*
- Kerangka Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Miskin*. (Makalah Workshop). Jakarta

